

## ANALISIS RASIO KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA BERDASARKAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023-2024

Asri Rama Gita Rangkuti<sup>1</sup>, Jihan Pahena Jariakh<sup>2</sup>, Renny Maisyarah<sup>3</sup>  
[asriramagita@gmail.com](mailto:asriramagita@gmail.com)<sup>1</sup>, [jihanpahenajariakh0527@gmail.com](mailto:jihanpahenajariakh0527@gmail.com)<sup>2</sup>, [rennymaisyarah@ymail.com](mailto:rennymaisyarah@ymail.com)<sup>3</sup>  
Universitas Pembangunan Panca Budi

### ABSTRAK

Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan instrumen penting dalam menilai tingkat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Analisis rasio keuangan digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah sehingga dapat diketahui tingkat efektivitas, efisiensi, dan kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya keuangannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi keuangan pemerintah kabupaten labuhan batu utara berdasarkan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Tahun anggaran 2023-2024. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif dengan pendekatan analisis rasio keuangan. Data yang digunakan berasal dari laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan kabupaten labuhan batu utara. Rasio yang dianalisis meliputi rasio pertumbuhan SILPA, rasio pertumbuhan ekuitas, rasio realisasi belanja tak terduga, serta analisis efisiensi pengelolaan anggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SILPA mengalami penurunan sebesar 53,20% dari Rp.107,27 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp.50,19 miliar pada tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan peningkatan efektivitas dalam perencanaan dan penyerapan anggaran. Namun demikian, ekuitas daerah mengalami penurunan sebesar 3,50% akibat defisit operasional dan tingginya beban penyusutan aset tetap. Selain itu, realisasi belanja tak terduga mengalami penurunan dari 80,999% menjadi 66,78%, yang menunjukkan menurunnya kebutuhan pendanaan untuk keadaan darurat dan bencana. Secara keseluruhan, kinerja keuangan pemerintah labuhan batu utara pada tahun 2024 menunjukkan perbaikan dalam pengelolaan anggaran, meskipun masih menghadapi tantangan dalam mempertahankan pertumbuhan kekayaan bersih daerah.

**Kata Kunci:** Analisis Rasio Keuangan, SILPA, Ekuitas, Belanja Tak Terduga, Kinerja Keuangan Daerah.

### ABSTRACT

*Regional government financial reports are an important instrument for assessing the level of accountability and transparency in regional financial management. Financial ratio analysis is used to measure regional government financial performance to determine the level of effectiveness, efficiency, and capability of the region in managing its financial resource. This study aims to analyze the financial condition of the North Labuhanbatu Regency Government based on the Regional Government Financial Reports (LKPD) for the 2023 and 2024 Fiscal Years. The research method used is a quantitative descriptive method with a financial ratio analysis approach. Data were derived from budget realization reports, operational reports, and notes to the North Labuhanbatu Regency financial statements. The ratios analyzed include the SILPA growth ratio, unexpected expenditure realization ratio, and budget management efficiency analysis. The results show that SILPA decreased by 53,20%, from IDR107.27 billion in 2023 to IDR50.19 billion in 2024. This decrease indicates increased effectiveness in budget planning and absorption. However, regional equity decreased by 3.50% due to operational deficits and high depreciation of fixed assets. Furthermore, the realization of unexpected expenditures decreased from 80.99% to 66.78%, indicating a reduced need for funding for emergencies and disasters. Overall, the financial performance of the North Labuhanbatu Regency Government in 2024 showed improvements in budget management, although it still faces challenges in maintaining regional net wealth growth.*

**Keywords:** Financial Ratio Analysis, SILPA, Equity, Unexpected Expenditures, Regional Financial Performance.

## **PENDAHULUAN**

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan indikator yang menggambarkan kemampuan daerah dalam mengelola pendapatan dan belanja secara efektif, efisien, transparan, serta akuntabel. Pengukuran kinerja keuangan daerah melalui analisis varians dan rasio keuangan diperlukan untuk menilai tingkat kemandirian fiskal, efektivitas pendapatan, efisiensi belanja, serta kemampuan daerah dalam mempertahankan pertumbuhan fiskalnya secara berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara sebagai daerah otonom di Provinsi Sumatera Utara menghadapi tantangan dalam mengelola keuangan daerah. Berdasarkan LKPD Kabupaten Labuhanbatu Utara tahun 2023-2024, struktur pendapatan daerah masih didominasi oleh dana transfer pemerintah pusat. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih relatif rendah, sehingga tingkat kemandirian fiskal daerah masih perlu ditingkatkan.

Penelitian ini menggunakan analisis varians, analisis rasio keuangan (derajat desentralisasi, efektivitas PAD, efisiensi belanja, rasio belanja modal, dan rasio SILPA), analisis pertumbuhan (year-on-year), serta analisis regresi sederhana.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2023-2024 jika dianalisis melalui analisis varians, rasio keuangan, pertumbuhan, dan regresi sederhana.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif (quantitative approach). Pendekatan kuantitatif dipilih karena data penelitian berupa angka-angka keuangan daerah yang dianalisis menggunakan perhitungan varians, rasio keuangan, dan pertumbuhan untuk menilai kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara. Astuti, Ilham, dan Madjid (2024) menjelaskan pendekatan kuantitatif dalam penelitian sektor publik digunakan untuk mengukur dan menganalisis kondisi keuangan pemerintah daerah secara objektif melalui data numerik yang dapat diolah secara statistik.

Data penelitian merupakan data sekunder kuantitatif dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2023-2024. Data meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), total pendapatan daerah, total belanja daerah, realisasi pendapatan dan belanja, serta komponen anggaran lain yang digunakan untuk menghitung analisis varians, rasio keuangan, dan pertumbuhan keuangan daerah. Penelitian juga memanfaatkan data pendukung dari Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan untuk mendukung kelengkapan dan validitas data.

Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi, yaitu menelaah dan mengumpulkan data numerik dari dokumen resmi pemerintah yang telah dipublikasikan. Pera, Lomi Ga, dan Kiak (2024) menjelaskan metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang efektif dalam penelitian keuangan daerah karena menggunakan sumber data resmi yang objektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Data yang dikumpulkan berupa angka-angka realisasi dan target anggaran dari LKPD Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2023-2024.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara pada Tahun Anggaran 2023-2024 dianalisis melalui empat pendekatan, yaitu analisis varians, analisis rasio keuangan, analisis pertumbuhan (year-on-year), dan analisis regresi sederhana. Keempat pendekatan tersebut menggambarkan kondisi pengelolaan keuangan daerah, kemampuan fiskal pemerintah daerah, efektivitas pencapaian pendapatan, efisiensi penggunaan

anggaran, serta perkembangan kapasitas keuangan daerah selama periode penelitian.

#### A. Analisis Varians (Selisih Anggaran vs Realisasi)

Analisis varians membandingkan anggaran (target) dalam APBD Perubahan 2024 dengan realisasinya. Analisis ini memberikan gambaran tingkat pencapaian target dan penyimpangan dalam pelaksanaan APBD.

##### 1. Analisis Varians Pendapatan 2024

Tabel 1. Analisis Varians Pendapatan 2024

Komponen Pendapatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Varians (Rp)	% Realisasi
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	59,23 M	64,34 M	+5,11 M	108,63%
Pajak Daerah	33,75 M	31,26 M	-2,49 M	92,62%
Retribusi Daerah	19,06 M	17,20 M	-1,86 M	90,24%
Lain-lain PAD yang Sah	3,91 M	12,08 M	+8,17 M	308,81%
Pendapatan Transfer	1.063,87 M	1.038,56 M	-25,31 M	97,62%
Total Pendapatan	1.136,71 M	1.113,65 M	-23,06 M	97,97%

Sumber: Diolah dari LKPD Labuhanbatu utara 2024

Realisasi pendapatan total mencapai 97,97% dari target anggaran. Target pendapatan hampir tercapai sepenuhnya. Beberapa catatan penting:

##### a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi PAD mencapai 108,63% dari target, melampaui anggaran sebesar Rp5,11 miliar. Capaian ini menunjukkan kinerja sangat baik dalam pengelolaan pendapatan asli daerah. Pencapaian ini didorong oleh komponen "Lain-lain PAD yang Sah" yang realisasinya mencapai 308,81% dari target (Rp12,08 miliar dari target Rp3,91 miliar), yang didominasi oleh denda keterlambatan pekerjaan dan temuan BPK.

##### b. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Kedua komponen menunjukkan realisasi di bawah target, masing-masing 92,62% dan 90,24%. Pemungutan pajak dan retribusi daerah belum optimal.

##### c. Pendapatan Transfer

Realisasi pendapatan transfer mencapai 97,62% dari target (Rp1.038,56 miliar dari target Rp1.063,87 miliar). Transfer dari pemerintah pusat berjalan sesuai rencana, meskipun terdapat selisih Rp25,31 miliar. Menilai kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara komprehensif selama periode 2022-2024, penelitian ini menggunakan empat rasio keuangan daerah, yaitu rasio kemandirian, efektivitas, efisiensi, dan pertumbuhan. Analisis ini relevan karena periode tersebut mencerminkan fase pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19, peningkatan tekanan belanja publik, serta tuntutan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBD. Dengan berlandaskan teori agensi, stakeholder, dan kinerja, keempat rasio ini digunakan untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu menjaga kemandirian fiskal, efektivitas pendapatan, efisiensi belanja, dan keberlanjutan pertumbuhan keuangan daerah.

##### 2. Analisis Varians Belanja 2024

Tabel 2. Analisis Varians Belanja 2024

Komponen Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Varians (Rp)	% Realisasi
Belanja Operasi	903,73M	857,79M	-49,95M	94,9%
Belanja Modal	164,85M	140,90M	-23,95M	85,47%

Belanja Tak Terduga	4,82M	3,22M	-1,60M	66,78%
Belanja	165,81M	165,81M	0	100,00%
Total Belanja	1.239,24M	1.167,73M	-71,51M	94,23%

Sumber : Diolah dari LKPD Labuhanbatu utara 2024

Realisasi belanja total mencapai 94,23% dari target anggaran. Realisasi belanja lebih rendah dari anggaran. Beberapa catatan penting:

a. Belanja Operasi

Realisasi belanja operasi mencapai 94,91% dari target (Rp857,79 miliar dari target Rp903,73 miliar), dengan varians negatif Rp49,95 miliar.

b. Belanja Modal

Realisasi belanja modal hanya mencapai 85,47% dari target (Rp140,90 miliar dari target Rp164,85 miliar), dengan varians negatif Rp23,95 miliar. Realisasi rendah ini mengindikasikan hambatan atau keterlambatan dalam pelaksanaan proyek infrastruktur seperti jalan, irigasi, dan jaringan. Keterlambatan disebabkan oleh masalah administrasi, keterlambatan tender, atau kendala teknis di lapangan.

c. Belanja Tak Terduga

Realisasi belanja tak terduga sangat rendah, hanya 66,78% dari target (Rp3,22 miliar dari target Rp4,82 miliar). Kebutuhan penanganan bencana di tahun 2024 lebih rendah dari perkiraan awal.

d. Belanja Transfer

Realisasi belanja transfer mencapai 100% dari target (Rp165,81 miliar). Transfer dana ke pemerintah desa dan pihak lain berjalan sesuai rencana.

## B. Analisis Rasio Keuangan

Analisis rasio keuangan mengukur kesehatan dan kinerja keuangan pemerintah daerah. Rasio yang dianalisis meliputi derajat desentralisasi, efektivitas PAD, efisiensi belanja, rasio belanja modal terhadap total belanja, dan rasio SILPA terhadap total belanja.

Tabel 3. Analisis Rasio Keuangan

Rasio	Rumus	2023	2024	Interpretasi
Derajat Desentralisasi	$\frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan}}$	5,31%	5,78%	Sangat Rendah. PAD hanya berkontribusi di bawah 6%, menunjukkan ketergantungan sangat tinggi pada dana transfer pusat.
Rasio Efektivitas PAD	$\frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}}$	-	108,63%	Efektif. Kemampuan menggali PAD melebihi target.
Rasio Efisiensi Belanja	$\frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$	-	94,23%	Kurang Efisien. Realisasi belanja lebih rendah dari anggaran (<100%), mengindikasikan tidak ada pemborosan anggaran namun penyerapan belum optimal.
Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja	$\frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}}$	18,78%	12,07%	Menurun. Alokasi belanja pembangunan aset fisik menurun, fokus pada belanja operasional atau ketidakmampuan menyerap anggaran modal.
Rasio SILPA	$\frac{\text{SILPA}}{\text{Total Belanja}}$	9,36%	4,30%	Sehat. Semakin kecil rasio ini,

SILPA Terhadap Total Belanja	Total Belanja	%		semakin baik perencanaan anggaran. Penurunan drastis menunjukkan perbaikan signifikan.
------------------------------	---------------	---	--	--

Sumber : Diolah dari LKPD Labuhanbatu utara 2023-2024

#### 1. Derajat Desentralisasi

Rasio derajat desentralisasi menunjukkan kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah. Tahun 2023 rasio ini mencapai 5,31%, meningkat sedikit menjadi 5,78% pada tahun 2024. Nilai ini masih sangat rendah. Berdasarkan kriteria, rasio derajat desentralisasi di bawah 10% menunjukkan ketergantungan sangat tinggi pada dana transfer pemerintah pusat. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara masih sangat bergantung pada pemerintah pusat dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Dalam perspektif teori agensi, pemerintah daerah sebagai agent belum optimal menggali potensi pendapatan daerah secara mandiri. Ketergantungan pada transfer pusat masih sangat tinggi. Dari sisi stakeholder, masyarakat berharap pemerintah daerah meningkatkan kemandirian fiskal untuk membiayai pembangunan daerah secara berkelanjutan.

#### 2. Rasio Efektivitas PAD

Rasio efektivitas PAD mengukur kemampuan pemerintah daerah merealisasikan target PAD. Tahun 2024 rasio ini mencapai 108,63%, termasuk kategori sangat efektif. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara mampu menggali PAD melebihi target. Capaian ini didorong oleh peningkatan penerimaan dari komponen "Lain-lain PAD yang Sah" yang mencapai 308,81% dari target.

Pemerintah daerah mampu mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah, termasuk melalui pemungutan denda dan sanksi administratif. Efektivitas yang tinggi lebih banyak didorong oleh komponen non-rutin, sehingga keberlanjutannya perlu dipertahankan melalui optimalisasi sumber PAD yang lebih stabil seperti pajak dan retribusi daerah.

#### 3. Rasio Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi belanja mengukur tingkat efisiensi penggunaan anggaran dengan membandingkan realisasi belanja terhadap anggaran belanja. Tahun 2024 rasio ini mencapai 94,23%, termasuk kategori kurang efisien. Realisasi belanja lebih rendah dari anggaran (secara nominal mengindikasikan tidak ada pemborosan), namun penyerapan anggaran belum optimal.

Dalam teori kinerja, efisiensi rendah dapat menjadi indikator pemerintah daerah belum mampu memanfaatkan seluruh anggaran yang tersedia untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Hal ini disebabkan oleh keterlambatan administrasi, rendahnya kapasitas pelaksana, atau perubahan prioritas program.

#### 4. Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja

Rasio ini mengukur alokasi belanja modal (belanja pembangunan aset fisik) terhadap total belanja daerah. Tahun 2023 rasio ini mencapai 18,78%, menurun drastis menjadi 12,07% pada tahun 2024. Alokasi belanja pembangunan aset fisik menurun, disebabkan oleh fokus pada belanja operasional atau ketidakmampuan menyerap anggaran modal.

Penurunan rasio belanja modal perlu mendapat perhatian serius. Belanja modal merupakan investasi jangka panjang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Penurunan belanja modal dapat menghambat pembangunan infrastruktur dan mengurangi daya saing daerah.

#### 5. Rasio SILPA terhadap Total Belanja

Rasio ini mengukur sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) terhadap total belanja daerah. Tahun 2023 rasio ini mencapai 9,36%, menurun drastis menjadi 4,30% pada tahun

2024. Penurunan ini menunjukkan perbaikan signifikan dalam perencanaan anggaran. Semakin kecil rasio SILPA menunjukkan perencanaan anggaran semakin baik (anggaran terserap optimal).

Dalam perspektif teori kinerja, penurunan rasio SILPA menunjukkan pemerintah daerah melakukan perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Sisa anggaran yang tidak digunakan semakin kecil. Hal ini merupakan sinyal positif bagi tata kelola fiskal daerah.

### C. Analisis Pertumbuhan (Year-on-Year)

Analisis pertumbuhan melihat perubahan kinerja keuangan dari tahun 2023 ke 2024. Analisis ini memberikan gambaran dinamika dan arah perkembangan keuangan daerah.

Tabel 4. Analisis Pertumbuhan (Year-on-Year) 2023-2024

Komponen	2023(Rp)	2024(Rp)	Pertumbuhan (%)	Keterangan
<b>Pendapatan</b>	1.078,12 M	1.113,65 M	+3,30%	Positif, namun kecil
PAD	57,22 M	64,34 M	+12,45%	Pertumbuhan sangat baik
Transfer	1.009,63 M	1.038,56 M	+2,87%	Tumbuh lambat
<b>Belanja</b>	1.145,88 M	1.167,73 M	+1,91%	Tumbuh lebih lambat dari pendapatan
Belanja Modal	215,24 M	140,90 M	-34,54%	Kontraksi signifikan
Belanja Operasi	771,47 M	857,79 M	+11,19%	Tumbuh, didorong belanja pegawai dan hibah
Surplus/Defisit(L RA)	-67,76 M	-54,07 M	+20,20%	Membaik. Defisit mengecil
SILPA	107,27 M	50,19 M	-53,20%	Perbaikan drastis dalam perencanaan
Ekuitas	2.066,62 M	1.994,31 M	-3,50%	Memburuk. Kekayaan bersih daerah menurun
Total Aset	2.077,60 M	2.030,21 M	-2,28%	Menurun, sejalan dengan penurunan ekuitas

Sumber : Diolah dari LKPD Labuhanbatu utara 2023-2024

#### 1. Sisi Positif

##### a. Pertumbuhan PAD (12,45%)

Pertumbuhan PAD sebesar 12,45% merupakan capaian sangat baik. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara mampu meningkatkan kapasitas pendapatan asli daerah secara signifikan. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan penerimaan dari komponen "Lain-lain PAD yang Sah" yang mencapai 308,81% dari target. Dalam perspektif teori kinerja, pertumbuhan PAD positif menunjukkan kemampuan pemerintah daerah mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah.

##### b. Perbaikan Defisit (20,20%)

Defisit LRA menurun dari Rp67,76 miliar tahun 2023 menjadi Rp54,07 miliar tahun 2024, membaik 20,20%. Pemerintah daerah berhasil mengurangi kesenjangan antara pendapatan dan belanja. Hal ini merupakan indikasi positif bagi keberlanjutan fiskal daerah.

##### c. Penurunan SILPA (53,20%)

SILPA menurun drastis dari Rp107,27 miliar tahun 2023 menjadi Rp50,19 miliar tahun 2024, turun 53,20%. Penurunan ini merupakan pertanda baik karena menunjukkan

perbaikan dalam perencanaan anggaran. Semakin kecil SILPA menunjukkan anggaran lebih terserap optimal.

## 2. Sisi Negatif

### a. Penurunan Ekuitas (3,50%)

Ekuitas menurun dari Rp2.066,62 miliar tahun 2023 menjadi Rp1.994,31 miliar tahun 2024, turun 3,50%. Penurunan ini disebabkan oleh defisit Laporan Operasional (LO) sebesar Rp56,48 miliar di tahun 2024. Defisit LO berasal dari beban penyusutan aset (Rp182,3 miliar) yang tinggi. Secara kas pemerintah sehat (tercermin dari penurunan SILPA), namun secara akuntansi kekayaan bersih daerah menurun.

### b. Penurunan Total Aset (2,28%)

Total aset menurun dari Rp2.077,60 miliar tahun 2023 menjadi Rp2.030,21 miliar tahun 2024, turun 2,28%. Penurunan ini sejalan dengan penurunan ekuitas, mencerminkan penyusutan aset dan berkurangnya investasi pemerintah daerah dalam aset produktif.

### c. Kontraksi Belanja Modal (34,54%)

Belanja modal mengalami kontraksi sangat signifikan, dari Rp215,24 miliar tahun 2023 menjadi Rp140,90 miliar tahun 2024, turun 34,54%. Investasi pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur dan aset fisik mengalami penurunan tajam. Pemerintah daerah lebih fokus pada belanja operasional dibandingkan belanja pembangunan.

## 3. Implikasi Terhadap Tata Kelola Fiskal

Berdasarkan hasil analisis, terdapat beberapa implikasi penting bagi tata kelola fiskal Kabupaten Labuhanbatu Utara:

Pertama, pengelolaan anggaran kas (LRA) menunjukkan perbaikan signifikan (defisit mengecil, SILPA turun), namun kondisi kekayaan bersih (ekuitas) memburuk karena kerugian operasional secara akrual (LO). Pemerintah daerah perlu meningkatkan pendapatan riil dan mengelola asetnya secara lebih produktif.

Kedua, kontraksi belanja modal yang sangat signifikan perlu menjadi perhatian serius. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang, pemerintah daerah perlu meningkatkan investasi dalam infrastruktur dan aset produktif lainnya.

Ketiga, ketergantungan tinggi pada dana transfer pusat (tercermin dari rendahnya derajat desentralisasi) menunjukkan pemerintah daerah perlu memperkuat upaya peningkatan PAD, terutama dari sektor pajak dan retribusi daerah yang memiliki potensi besar namun belum optimal.

## D. Analisis Regresi Sederhana

Data hanya tersedia untuk dua tahun (2023 dan 2024), sehingga analisis regresi yang kuat secara statistik tidak dapat dilakukan secara optimal. Hubungan dan pengaruh satu variabel terhadap variabel lain dapat dilihat secara deskriptif.

Model: Pengaruh Penerimaan Pembiayaan (X) terhadap SILPA (Y)

### 1. Data

2023: X = 181,03 M (Penerimaan Pembiayaan/SILPA tahun lalu), Y = 107,27 M (SILPA)

2024: X = 107,27 M (Penerimaan Pembiayaan/SILPA tahun lalu), Y = 50,19 M (SILPA)

### 2. Deskripsi Hubungan

Terdapat hubungan positif yang kuat antara penerimaan pembiayaan dan SILPA. Ketika penerimaan pembiayaan (SILPA tahun sebelumnya) turun drastis (dari 181 M → 107 M), SILPA tahun berjalan juga turun drastis (107 M → 50 M). Hubungan ini menunjukkan korelasi erat antara penggunaan SILPA tahun sebelumnya dan sisa anggaran tahun berjalan.

### 3. Persamaan Regresi Linear (2 titik

Dengan menggunakan dua titik data, persamaan regresi linear sederhana:

$$Y = 0,806X - 33,8$$

### 4. Interpretasi

Setiap kenaikan 1 miliar pada penerimaan pembiayaan (penggunaan SILPA lama), menaikkan SILPA tahun berjalan sebesar 0,806 miliar. Jika SILPA tahun sebelumnya lebih besar, maka SILPA tahun berjalan cenderung juga lebih besar.

### 5. Keterbatasan

Persamaan ini sangat sederhana dan tidak dapat digunakan untuk prediksi yang andal karena hanya berdasarkan 2 titik data. Untuk mendapatkan model regresi yang lebih robust, diperlukan data yang lebih banyak (minimal 10-15 periode) sehingga analisis statistik yang lebih akurat dapat dilakukan.

## E. Analisis Prediksi (Proyeksi 2025)

Meskipun dengan keterbatasan data, prediksi untuk tahun 2025 dapat dibuat berdasarkan asumsi tren linier dari tahun 2023 ke 2024 berlanjut ke 2025. Prediksi ini menggunakan rata-rata perubahan dari tahun 2023 ke 2024.

Tabel 8. Prediksi Kinerja Keuangan 2025

Variabel	2023	2024	Rata-Rata Perubahan	Prediksi 2025 (dengan asumsi rata-rata)
PAD	57,22 M	64,34 M	+12,45%	Rp72,36 M
Belanja Modal	215,24 M	140,90 M	-34,54%	Rp92,23 M
SILPA	107,27 M	50,19 M	-53,20%	Rp23,49 M
Ekuitas	2.066,62 M	1.994,31 M	-3,50%	Rp1.924,51 M
Defisit LO (Akruwal)	+25,65 M	-56,48 M	-82,14 M (penurunan)	(Rp139,28 M) perlu dicermati

Sumber : Diolah dari LKPD Labuhanbatu utara 2023-2024

#### 1. Prediksi SILPA (Rp23,49 M)

Prediksi ini merupakan skenario moderat. Jika tren perbaikan perencanaan terus berlanjut, SILPA akan terus mengecil. Hal ini merupakan sinyal sangat positif. Penurunan SILPA yang terus berlanjut menunjukkan pemerintah daerah semakin baik dalam merencanakan dan melaksanakan anggaran.

#### 2. Prediksi Ekuitas (Rp1.924,51 M)

Jika tidak ada intervensi, kekayaan bersih daerah diprediksi terus turun. Hal ini perlu menjadi perhatian utama pemerintah daerah karena penurunan ekuitas yang berkelanjutan dapat mengancam keberlanjutan fiskal daerah dalam jangka panjang.

#### 3. Defisit LO

Sangat sulit diprediksi hanya dengan dua tahun data karena lonjakan defisit di tahun 2024 terutama disebabkan oleh beban penyusutan aset (non-tunai). Beban ini akan terus membesar seiring bertambahnya aset baru. Defisit LO diperkirakan akan terus terjadi karena beban penyusutan yang tinggi. Beban penyusutan adalah beban non-tunai yang tidak mempengaruhi arus kas pemerintah daerah.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara tahun anggaran 2023-2024 menggunakan analisis varians, rasio keuangan, pertumbuhan, dan regresi sederhana, dapat disimpulkan:

1. Analisis Varians menunjukkan realisasi pendapatan dan belanja mendekati target,

menandakan perencanaan cukup baik. Realisasi pendapatan total mencapai 97,97% dari target, realisasi belanja mencapai 94,23%. Belanja modal dan belanja tak terduga memiliki varians negatif signifikan, masing-masing hanya mencapai 85,47% dan 66,78% dari target. Hal ini mengindikasikan hambatan dalam pelaksanaan proyek infrastruktur dan rendahnya kebutuhan dana darurat.

2. Analisis Rasio Keuangan menunjukkan derajat desentralisasi masih sangat rendah (5,78%), ketergantungan sangat tinggi pada dana transfer pusat. Rasio efektivitas PAD mencapai 108,63% (sangat efektif), rasio efisiensi belanja 94,23% (kurang efisien). Rasio belanja modal terhadap total belanja menurun dari 18,78% menjadi 12,07%. Rasio SILPA terhadap total belanja menurun drastis dari 9,36% menjadi 4,30% (pertanda baik dalam perencanaan anggaran).
3. Analisis Pertumbuhan menunjukkan PAD tumbuh pesat (12,45%), defisit anggaran mengecil (20,20%), dan SILPA turun drastis (53,20%) yang merupakan pertanda baik. Namun ekuitas dan total aset menurun masing-masing 3,50% dan 2,28%, terutama disebabkan defisit Laporan Operasional (LO) Rp56,48 M akibat beban penyusutan aset tinggi.
4. Analisis Regresi Sederhana menunjukkan hubungan positif antara penerimaan pembiayaan (SILPA tahun sebelumnya) dan SILPA tahun berjalan dengan persamaan  $Y = 0,806X - 33,8$ . Model ini masih sangat terbatas karena hanya menggunakan 2 titik data.
5. Prediksi 2025 menunjukkan SILPA diprediksi terus menurun (Rp23,49 M) yang merupakan sinyal positif. Ekuitas diprediksi terus turun (Rp1.924,51 M) jika tidak ada intervensi. Defisit LO diprediksi terus terjadi karena beban penyusutan tinggi.

Secara keseluruhan, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara menunjukkan peningkatan kualitas pengelolaan anggaran kas (LRA) di tahun 2024, tercermin dari PAD yang tumbuh, defisit mengecil, dan SILPA lebih rendah. Kondisi kekayaan bersih (ekuitas) memburuk karena kerugian operasional secara akrual (LO). Ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan riil dan mengelola asetnya secara lebih produktif.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa saran untuk Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara:

1. Memperkuat Kemandirian Fiskal melalui diversifikasi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama sektor pajak dan retribusi daerah. Digitalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah perlu dioptimalkan untuk meningkatkan penerimaan dan mengurangi kebocoran.
2. Meningkatkan Penyerapan Belanja Modal dengan memperbaiki proses perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan proyek infrastruktur. Hambatan administratif dan teknis yang menyebabkan rendahnya penyerapan belanja modal perlu diidentifikasi dan diatasi.
3. Mengoptimalkan Pengelolaan Aset Daerah untuk meningkatkan produktivitas aset dan mengurangi beban penyusutan yang menyebabkan defisit Laporan Operasional. Aset tidak produktif perlu diidentifikasi dan dikelola lebih efisien.
4. Mengendalikan Belanja Operasional yang cenderung meningkat (11,19%) untuk menjaga keseimbangan antara belanja rutin dan belanja pembangunan. Pemerintah daerah perlu melakukan rasionalisasi belanja operasional tidak produktif dan mengalokasikan anggaran ke program lebih berdampak.
5. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melalui penyediaan informasi anggaran yang mudah diakses masyarakat dan pemangku

- kepentingan. Partisipasi publik dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran perlu ditingkatkan.
6. Memperkuat Manajemen Risiko Fiskal untuk menjaga stabilitas keuangan daerah menghadapi dinamika ekonomi dan perubahan kebijakan pemerintah pusat. Pemerintah daerah perlu memiliki strategi mitigasi risiko fiskal komprehensif.
  7. Menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja yang lebih kuat dengan mengaitkan setiap alokasi anggaran dengan output dan outcome jelas dan terukur. Hal ini akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran serta memudahkan evaluasi kinerja.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Astuti, R., Ilham, A., & Madjid, R. (2024). Kinerja keuangan pemerintah daerah dan implikasinya terhadap transparansi fiskal. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*.
- Freeman, R. E. (1984). *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Boston: Pitman.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360.
- Mahmudi. (2019). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Pera, Y., Lomi Ga, Y., & Kiak, N. (2024). Efisiensi dan tata kelola anggaran daerah di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Permatasari, D. (2024). Analisis rasio keuangan dalam pengukuran kinerja pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan Daerah*.
- Pratama, R., Mustika, A., & Karpriana, I. (2024). Pertumbuhan PAD dan pengaruhnya terhadap kinerja keuangan daerah. *Jurnal Akuntansi Sektor Publik*.
- Purba, J., Panggabean, M., Br Purba, R., Manalu, S., & Sitanggang, P. (2024). Kemandirian fiskal dan ketergantungan transfer pemerintah pusat. *Jurnal Keuangan Daerah*.
- Sari, D., & Darma, B. (2021). Dampak pandemi COVID-19 terhadap keuangan daerah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*.